

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tayangan televisi menjadi salah satu dari beberapa media penyiaran yang menjadi pilihan bagi masyarakat, karena televisi selain mampu memberikan informasi dan hiburan secara *audio visual*, juga mudah di akses oleh masyarakat. Berbagai jenis kategori tayangan pertainstansi dapat ditemukan dengan mudah seperti *variety show*, jurnalistik, sinema, *entertainment*, iklan niaga dan iklan layanan masyarakat. Berbagai bentuk tayangan tersebut tentunya mampu berdampak terhadap masyarakat, baik berdampak positif maupun berdampak negatif.

Tayangan pertainstansi yang berdampak negatif menjadi kekhawatiran yang dirasakan masyarakat, karena dalam tayangan pertainstansi dengan mudah dijumpai tayangan yang berindikasi negatif. Contoh program yang menumbuhkan rasa khawatir kepada masyarakat seperti yang terjadi pada tayangan “anak jalanan” yang tayang di Stasiun Televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI).

Program acara “anak jalanan” diidapati banyak kritikan oleh masyarakat karena berbagai tayangannya yang mampu mencederai moral masyarakat, seperti

perkelahian, kebut-kebutan antar geng motor, namun “acara anak jalanan” bisa dikatakan cukup sukses, hal tersebut terlihat dari beberapa penghargaan yang di dapat. Berikut hasil penghargaan yang di raih oleh “anak jalanan” :

Tabel I.I
Bentuk Penghargaan tayangan anak jalanan

Tahun	penghargaan	Kategori	Nominasi	Hasil
2016	Indonesian Television Awards 2016	Sinetron populer	Anak jalanan	menang
2016	Panasonic Gobel Awards	Drama seri terfavorit	Anak jalanan	menang
2016	Silet Awards	Sinetron tersilet	Anak jalanan	menang

Sumber : Jurnal Komunikasi¹, Tahun 2017

Meskipun tayangan “anak jalanan” sering didapati melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, hingga pada 1 Februari 2017 Stasiun Televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) baru mengambil sikap penghentian tayangan untuk waktu yang tidak ditentukan, dan tentu suatu saat Stasiun Televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) masih dapat

¹ Diky Wiryanto Bahari, 2017, Pengaruh tayangan sinetron anak jalanan terhadap perilaku, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 03 No. 1, Hlm. 3, sumber : researchgate.net

menayangkannya kembali dengan program yang sama, dan bahkan hanya berubah nama judul program.²

Program lainnya yang menumbuhkan rasa khawatir kepada masyarakat seperti tayangan “Ini Talkshow”, tayang di Stasiun Televisi Net TV. Program acara “ini talkshow” pada tanggal 28 Maret 2019 menampilkan seorang pria berkata “kunyuk”, ditujukan terhadap gambar wajah orang lain. Tayangan tersebut berindikasi melanggar pasal 9 yang tercantum dalam Standar Program Siaran tentang kewajiban program siaran memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan. Tayangan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena dapat dengan mudah ditiru oleh individu dan tentu akan mengancam pergaulan masyarakat.

Melihat tayangan televisi diatas, menjadikan keresahan bagi publik dengan semakin banyaknya tayangan-tayangan yang mampu mengancam perkembangan nilai dan perilaku masyarakat dan tentunya tidak mengindahkan Undang-undang No. 32 tahun 2002. Tayangan Televisi dalam beberapa tayangannya ditemui memiliki konten isu hak privasi / *personal trouble* yang tidak memiliki kebermanfaatan untuk publik, seharusnya isu hak privasi merupakan salah satu *point* dari perlindungan penyairan yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

² Emilio E. Mandagi, 2016, Persepsi Tayangan sinetron anak jalanan di RCTI oleh masyarakat di lingkungan 11 kelurahan Malalayang, *e-jurnal komunikasi*, Vol. 4, No. 5, Hlm. 7. sumber : media.neliti.com

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang berisi isu perlindungan terhadap hak privasi diatur dalam pasal 13 ayat 1 tentang penghormatan terhadap hak privasi (lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan sesuatu program siaran baik siaran langsung ataupun tidak langsung) dan pasal 13 ayat 2 yang berbunyi (permasalahan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan atau disajikan dalam seluruh isi mata acara kecuali demi kepentingan publik yang tinggi).³

Efek kedepan yang akan tumbuh dari tayangan yang merugikan bagi publik ialah bergesernya nilai serta norma yang terjadi pada masyarakat, atau bahkan mampu melunturkan nilai norma yang melekat pada masyarakat, karena tayangan pertelevisian terlihat memberi kesan kekerasan, hedonisme tentang identitas masyarakat kelas atas, seksual dan pronografi, hingga tayangan yang tak mempedulikan hak privasi, seolah-olah dijejalkan kepada masyarakat setiap harinya, dan dikonstruksikan secara berkesinambungan melalui program-program ini.

Hadirnya tayangan pertelevisian yang merugikan, tentu berdampak kepada masyarakat berupa peniruan tayangan, baik berupa visualisasi maupun aksi fisik seperti berkata kasar atau tidak sopan, *bullying*, bertengkar / melakukan tindak

³ UU NO. 32 Tahun 2002 “UU Penyiaran”

kekerasan, dan berbagai macam kegiatan buruk lainnya.⁴ Hal tersebut terjadi karena tayangan televisi masa kini sudah jauh beda dengan pertelevisian masa lampau, dimana pertelevisian dahulu amat banyak film anak, remaja dan dewasa yang mendidik seperti film saras (pahlawan perempuan) yang mengajarkan untuk memberantas kejahatan dengan dibantu sahabatnya yang gemar minum susu agar kuat, sehingga mencerminkan sikap membela bagi setiap yang lemah dan memompa penonton untuk gemar minum susu untuk menghasilkan tubuh yang kuat dan sehat, selain itu terdapat pula film *blues clues* yang memberikan pesan kepada penontonnya untuk tenang dalam memecahkan teka-teki permasalahan.⁵ Saat ini sudah sedikit tayangan televisi yang seperti itu, karena mewabahnya tayangan berkonten kekerasan, *bullying*, saling membuka hak privasi dan kegiatan negatif lainnya, sehingga dari mewabahnya tayangan berkonten merugikan tersebut mampu berdampak negatif terhadap sosialisasi perkembangan remaja.

Keresahan yang terdapat di tayangan televisi, dibutuhkan peran lembaga untuk mengatasi tayangan televisi yang merugikan untuk masyarakat, upaya tersebut sesungguhnya ada pada lembaga independen negara yang memiliki wewenang penuh dalam menjaga jenis konten penayangan televisi agar tidak

⁴ *Opcit*, Emilio E. Mandagi, Hlm. 6

⁵ Ellen Wartela. 2016. *What Kind Of Adults Will Our Children Become? The Impact Of Growing Up In a Media-Saturated World*. Journal of Children and media. Volume 10. No. 01. Cmhd.northwestern.edu > 2016/03

berdampak negatif yaitu Komisi Penyiaran Indonesia baik tingkat pusat maupun daerah.

Komisi Penyiaran Indonesia adalah regulator media penyiaran di bidang isi, Komisi Penyiaran Indonesia menjadi ujung tombak harapan masyarakat dalam isi konten penayangan televisi, sedangkan untuk layanan sensor, sudah ada wewenang dari Lembaga Sensor Film.⁶ Komisi Penyairan Indonesia dengan Lembaga Sensor Film diharapkan ada diskusi bersama agar KPI dapat lebih maksimal dalam mengontrol dan menjaga isi media siaran agar tetap sehat dan tepat sasaran buat kehidupan masyarakat.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang No.32 tahun 2002, Undang-undang tentang penyiaran ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran karena undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 terasa sudah tidak relevan untuk digunakan, karena memperlihatkan praktik ketidakseimbangan, dimana pemerintahan memiliki otoritas tinggi dalam penyiaran, dalam artian saat itu penyiaran dikuasai oleh negara, sehingga pembinaan dan pengendaliannya dilakukan secara penuh oleh pemerintah.

⁶ Amir Effendi Siregar, 2014, *Mengawal Demokratisasi Media (Menolak konsentrasi, Membangun keberagaman)*. PT. Kompas Media Nusantara.

Undang-undang No. 32 tahun 2002 yang memaparkan fungsi dan peranan tayangan televisi yaitu harus mengandung informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat dalam membentuk intelektualitas, watak, moral, dan kemajuan bangsa.⁷ Hadirnya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang lahir atas mandat UU No.32 Tahun 2002 sebagai wajah demokrasi, hal tersebut terlihat jelas dari mandatnya yang mengejar cita-cita tayangan yang demokratis dan edukatif untuk publik termasuk masyarakat daerah DKI Jakarta.

Komisi Penyiaran Indonesia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). KPI Pusat memiliki wewenang / otoritas penuh terhadap menjaga stabilitas penyiaran televisi nasional, sedangkan KPI Daerah memiliki wewenang / otoritas penuh terhadap menjaga stabilitas penyiaran televisi sesuai masing-masing daerah jangkauannya. Anggaran kegiatannya memiliki perbedaan antara KPI Pusat dengan KPI Daerah, KPI Pusat memiliki anggaran kegiatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan KPI Daerah memiliki anggaran kegiatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta melakukan fungsinya sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewedahi aspirasi serta

⁷ Nelly Muhriani,2015, Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Mengawasi Siaran Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, *Jurnal pro justisia*, 2014, vol. 03 nomor 10, hlm. 72 media.neliti.com

mewakili kepentingan masyarakat tentang penyiaran. KPID DKI Jakarta memiliki wewenang menetapkan standar program siaran (batasan, pelarangan, kewajiban, peraturan penyiaran dan sanksi berdasarkan P3SPS), menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan P3SPS, memberi sanksi jika Stasiun Televisi didapati melanggar P3SPS dan melaksanakan kerjasama dengan *stakeholder* wilayah, lembaga penyiaran dan pemerintah.⁸

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta sebagai lembaga kontrol sosial, menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk memaksimalkan upaya kontrol sosial dengan menjaga kestabilan konten tayangan televisi agar ramah dan edukasi bagi masyarakat. Kestabilan konten ramah dan mendidik bagi masyarakat terlihat dari menjaga norma sosial agar tetap stabil, karena lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta memiliki fungsi untuk memperjuangkan norma dan nilai untuk kebutuhan dan tindakan sosial.

Hadirnya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta menjadi harapan besar bagi masyarakat terkhusus masyarakat Daerah DKI Jakarta dalam mengawasi berbagai jenis tayangan pertelevisian, karena televisi mempunyai

⁸ *Ibid*, Hlm.3.

peran sebagai alat sosialisasi, media pengetahuan, mendidik, menghibur dan mempengaruhi bagi siapapun yang menontonnya.⁹

Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia baik tingkat pusat maupun daerah termasuk KPID DKI JAKARTA di hadapan masyarakat terlihat masih belum maksimal, hal tersebut terlihat dari kritikan masyarakat melalui media sosial Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Daerah, namun dari kritikan tersebut ditemui ada yang keluar dari wewenang Komisi Penyiaran Indonesia baik tingkat Pusat maupun Daerah seperti dibawah ini:

Gambar I.I

Kesalahpahaman masyarakat



Sumber : Instagram KPI, 2019

Kesalahpahaman masyarakat dalam memandang kinerja KPI baik tingkat pusat maupun daerah dan tayangan televisi yang masih ditemui melanggar

⁹ Subhan Afifi, 2010, Tayangan bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia, *jurnal ilmu komunikasi*, vol. 8, No. 3, Hlm 3. media.neliti.com.

P3SPS, menjadikan alasan peneliti untuk mengangkat penelitian ini. Peneliti akan melihat apakah pengawasan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta sebagai lembaga independen negara sudah mampu dalam mengontrol tayangan ptelevisian agar tidak keluar dari Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Penelitian ini juga dapat dijadikan panduan bagi masyarakat mengenai fungsi KPID DKI Jakarta sebagai kontrol dalam berbagai tayangan ptelevisian.

1.2 Permasalahan Penelitian

Penelitian ini beranjak dari keresahan akan problematika yang tumbuh dari banyaknya penayangan ptelevisian masa kini kian mengkhawatirkan, terlebih dengan mewabahnya tayangan tak berkualitas yang menghadirkan tayangan kekerasan, seks, bullying, ketidaksetaraan gender hingga pembukaan aib seseorang yang tidak memiliki kebermanfaatan untuk masyarakat.

Hal tersebut menjadi problematika karena dalam setiap siaran yang ditayangkan tentu akan berdampak kepada penonton yang menonton siaran tersebut, terlebih anak dan remaja yang belum sepenuhnya mampu menseleksi tayangan yang layak untuk dirinya, dengan mudahnya mengakses siaran tersebut dan tentu secara perlahan anak dan remaja akan dengan mudahnya terpengaruh oleh tayangan tersebut dan dikhawatirkan dapat mempraktekan dari tayangan tersebut kepada lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan berbagai persoalan yang terjadi, peneliti menggali lebih dalam tentang Pengawasan KPID DKI Jakarta terhadap tayangan pertelevisian, dengan harapan mampu mengetahui seberapa besar pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta dalam mengontrol tayangan pertelevisian agar tidak keluar dari koridor Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. dan ingin membatasi permasalahan penulisan, tujuannya agar pembahasan yang dilakukan oleh penulis dapat lebih fokus dan juga lebih mempermudah penulisan. Permasalahan penulisan yang diangkat oleh penulis yaitu :

1. Apa tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta?
2. Bagaimana upaya pengawasan dan penjatuhan sanksi oleh KPID DKI Jakarta terhadap stasiun televisi?
3. Apakah fungsi pengawasan dan penjatuhan sanksi yang dilakukan KPID DKI Jakarta sudah berfungsi atau disfungsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab keresahan dari peneliti tersebut, yakni untuk mendeskripsikan sejauh mana fungsi kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta sebagai kontrol sosial sesuai yang tertera dalam mandat Undang-undang No.32

Tahun 2002 tentang penyiaran publik, karena sejauh ini fungsi kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta seperti kurang efektif sebagai kontrol sosial terkhusus di bidang penyairan (Televisi) dan publik mengalami ketidakpuasan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta dalam mengawasi tayangan-tayangan televisi yang kian hari semakin terasa merugikan publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penulisan ini mampu memberikan sebuah kontribusi pada ilmu pengetahuan serta membuka kesadaran masyarakat bahwa sesungguhnya terdapat sebuah problematika yang dihasilkan dari siaran televisi yang mampu mengancam norma masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk pembaca melihat fungsi KPID DKI Jakarta sebagai kontrol sosial, kemudian dapat memberikan masukan untuk penulis lain yang melakukan penulisan serupa. Dengan demikian, kehadiran penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana bentuk perwakilan tayangan yang berindikasi melanggar, dan terdapat lembaga memiliki fungsi menekan siaran berkonten tak layak untuk masyarakat yaitu Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta (KPID DKI Jakarta).

1.5 Tinjauan Pustaka Sejenis

Pada bagian tinjauan pustaka sejenis ini, berguna untuk acuan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti disini berusaha mengkaji dan mencermati beberapa jurnal ataupun buku yang dirasa cocok dengan konsep yang peneliti tulis. Hal ini juga berguna agar menghindari penelitian yang sama atau biasa disebut dengan plagiat penelitian. Kegunaan lain dari bagian tinjauan pustaka ini ialah peneliti bisa melihat kekurangan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga nantinya peneliti berharap dapat menutupi ataupun meng-*upgrade* kekurangan tersebut sesuai dengan fenomena yang dikaji. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang digunakan ialah sebagai berikut :

Pertama, Jurnal ilmiah yang dibuat oleh Khairin Nizomi.¹⁰ Dalam jurnal ini membahas problematika kualitas tayangan televisi Indonesia, yang dimana kualitas penayangan televisi di Indonesia relatif masih rendah kualitasnya. Hal tersebut tercermin dari banyaknya program penyiaran yang dikeluhkan masyarakat dan juga mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia yang disebabkan program penayangan tidak mengacu pada Standar Program Siaran (SPS).

¹⁰ Khairin Nizomi, 2018, Literasi Media Analisis Isi Terhadap Tayangan Televisi Pesbukers, *Jurnal ilmu perpustakaan dan informasi*, Vol. 03, No. 01. sumber : jurnal.uinsu.a.id

Jurnal ini menggunakan konsep analisis penayangan program televisi yang di selektif terkhusus yang berkonten tidak edukatif dan merugikan bagi anak-anak dan juga remaja bahkan masyarakat. Dalam analisis jurnal ini tayangan yang diangkat ialah Late Night Show, Acara Duo Pedang dan Pesbukers.

Argumentasi penulis dalam analisis penayangan televisi dalam jurnal ini ialah terjadinya konten-konten tak layak seperti yang terjadi pada acara pesbukers yang tayang pada tanggal 28 Februari 2018 pada pukul 16.27 WIB (Eli Sugigi) mengucapkan kata T*I kepada temannya, tentu dalam kasus tersebut telah teridentifikasi masuk ke dalam kategori pelanggaran atas penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan anak-anak dan remaja, karena dari tayangan tersebut mampu di tirukan oleh anak-anak dan remaja ketika berinteraksi kepada temannya (tanpa mengindahkan lagi norma kesopanan dan kesusilaan).

Temuan yang didapat dalam penelitian di dalam jurnal ini ialah peneliti telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran pada program Pesbukers ANTV, dimana terdeteksinya penayangan adegan yang melecehkan orang atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu, serta melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.

Relevansi jurnal ini dengan skripsi “Fungsi KPID DKI Jakarta sebagai kontrol sosial” ialah mengetahui tolak ukur dalam analisis penayangan televisi di

Indonesia dan mengetahui problematika-problematika atas buruknya penayangan televisi yang mengejar rating dan menterbelakangkan esensi, edukasi, moral kesopanan dan kesusilaan dan berbagai hal lainnya, sehingga kualitas program televisi relatif rendah. Dari hal ini menjadikan cerminan salah satu tayangan yang jauh dari kata edukatif dan ramah remaja, sehingga memudahkan peneliti dalam mengkaji lebih mendalam terkait bentuk perwakilan dari keresahan tayangan yang menyelimuti masyarakat, dengan meninjau tayangan melalui esensi, edukasi, moral kesopanan dan kesusilaan.

Kedua, Jurnal ilmiah yang dibuat oleh Subhan afifi.¹¹ jurnal ini membahas keresahan program televisi. Semakin resahnya program televisi pasca reformasi, sehingga dibanjiri kritik dari masyarakat, hal tersebut terjadi karena publik resah dengan semakin banyaknya tayangan-tayangan bermasalah di televisi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa, tayangan yang sering dikeluhkan masyarakat pada umumnya mayoritas tayangan bermuatan seksual, pornografi dan kekerasan yang dinilai memberi dampak negatif, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Sehingga dibutuhkannya peran kpi sebagai kontrol sosial dalam mengembalikan arah media televisi kembali ke fungsi dan peranannya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) terhadap keseluruhan teguran kpi kepada program tv, ada 123 teguran selama periode

¹¹ Subhan Afifi, 2010, Tayangan Bermasalah Dalam Program Acara Televisi di Indonesia, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 08 No. 03. sumber : <https://media.neliti.com>

2009 dengan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). dengan jenis teguran (himbauan, klarifikasi, penghentian sementara, peringatan, teguran dan lainnya).

Argumen penulis dalam jurnal ini ialah peran KPI sangat dibutuhkan sebagai kontrol sosial, yang dianalogikan layaknya seperti posisi *civil society* (posisi *civil society* di tengah antara pemerintah dan pasar). dibutuhkan sebuah ketegasan dari KPI dalam menindak tayangan-tayangan televisi yang mengalami atau mengandung unsur yang bermasalah, terkhusus tayangan yang merugikan anak dan remaja.

Hasil penelitian dalam jurnal ini ialah tayangan yang bermasalah yang melanggar P3SPS yang telah ditetapkan, akan mendapatkan perhatian khusus dari KPI. Berbagai teguran, klarifikasi atau bahkan penghentian sementara diberikan kepada stasiun televisi yang dinilai melanggar. “himbauan” biasanya diberikan KPI sebagai nasihat untuk mengingatkan kembali, agar stasiun-stasiun televisi mematuhi peraturan yang ada. “klarifikasi” diberikan jika KPI menginginkan penjelasan lebih lanjut dari stasiun televisi, bila sebuah program dipermasalahkan masyarakat. “peringatan” biasanya diberikan jika KPI sudah menilai bahwa stasiun televisi tidak mematuhi himbauan yang diberikan. “Teguran” merupakan peringatan yang lebih keras lagi jika berbagai teguran tidak diindahkan, kemudian KPI akan memberikan sanksi administratif berupa “pemberhentian sementara” dan “penghentian”.

Relevansi jurnal ini dengan skripsi “Fungsi KPID DKI Jakarta sebagai kontrol sosial ” ialah sebagai data pendukung peneliti yang akan digunakan dalam penelitian dalam hal untuk melihat kekuasaan KPI sebagai kontrol sosial dan meninjau jenis bentuk sanksi apa saja yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia kepada setiap penyiaran program yang masuk ke dalam kategori bermasalah dan menganalisisnya dengan situasi kondisi tayangan televisi masa kini, sehingga peneliti nantinya dapat mengklasifikasikan menganalisis dari tiap kategori bentuk teguran KPI kepada program tayangan yang bermasalah.

Ketiga, Jurnal ilmiah yang dibuat oleh Ida Bagus Sudarma.¹² Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini ialah dalam sebuah tatanan masyarakat, akan ditemui berbagai bentuk penyimpangan.

Metode yang diangkat dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan mendalami konsep pengendalian sosial, dimana peneliti melihat dalam beberapa penyimpangan yang terjadi di masyarakat terjadi atas norma dan nilai sosial yang tidak tersosialisasi kepada masyarakat.

Teori yang diangkat dalam permasalahan ini ialah teori Pengendalian sosial, dimana peneliti menekankan bahwa pengendalian sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna menjaga keteraturan dan menekan penyimpangan yang terjadi baik tingkat individu maupun tingkat kelompok.

¹² Ida Bagus Sudarma, 2018, sifat control : sifat dan sanksi sebagai sarana kontrol sosial, *jurnal pengendalian sosial*, vol.13, No. 01. ejournal.ihdn.ac.id

Hasil Penelitian dalam jurnal ini ialah dalam pengendalian sosial dibutuhkan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif merupakan pencegahan yang dilaksanakan oleh pihak berwenang, agar kemungkinan terjadinya sebuah penyimpangan dapat dihindari. Sedangkan tindakan represif merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap seorang atau kelompok yang melakukan pelanggaran, sanksi diberikan guna menghilangkan efek jera.

Relevansi jurnal ini dengan penelitian "Fungsi KPID DKI Jakarta sebagai kontrol sosial" ialah sebagai pendukung analisis mengenai tindakan untuk upaya pengendalian sosial, tindakan tersebut bisa berupa tindakan preventif dan bisa juga berupa tindakan represif.

Keempat, Jurnal ilmiah yang dibuat oleh Dali Osepashvili.¹³ Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini ialah kesalahan utama yang dilakukan oleh wartawan/media Georgia dalam publisitas dari korban identitas anak-anak dan tempat tinggal mereka, hal tersebut menjadi keresahan utama karena wartawan/media harus memiliki etika dalam membuat sebuah proyek pemberitaan, terkhusus dalam pemerhati hak-hak anak.

Teori yang diangkat dalam permasalahan ini ialah teori konflik, dimana ada yang mendominasi (media) dan ada yang di dominasi (korban anak yang sebagai objek dari tindakan kekerasan). hal tersebut menjadi ketimpangan karena terasa

¹³ Dali Osepashvili, 2013, Children's Right and Challanges Of Journalistic Ethic In Georgian Media, *Media Mass And Communication*, Volume 2, No. 7. sumber : www.scientific-publication.net

seperti tereksplorasi, di sisi lain pun psikologis anak mampu terganggu (rasa traumatis pada korban/anak dapat meningkat).

Hasil Penelitian dalam jurnal ini ialah pelanggaran dasar wartawan / media dalam proyek pemberitaan anak-anak korban tindakan kekerasan di televisi terdapat pada identifikasi korban, banyak jurnalis yang memaparkan dengan jelas nama anak (sebagai korban) dan tempat tinggalnya. Hal tersebut merupakan bentuk usaha jurnalis untuk memberi info dan meminimalkan tindakan kekerasan itu, namun justru melanggar hak dan martabat anak, dan yang terasa secara langsung, menimbulkan tekanan psikologis yang lebih parah terhadap anak. Solusi untuk masalah ini ialah dengan mengadakan pelatihan dari waktu ke waktu untuk yang bekerja di media organisasi, dan membuat regulasi tentang standar perlindungan pemberitaan yang profesional.

Relevansi dalam jurnal ini ialah sebagai komprehensif data pembandingan bagi peneliti bahwa untuk dunia pers, membutuhkan sebuah etika dalam penayangan pemberitaannya, terlebih dalam melahirkan pemberitaan yang memperjuangkan hak-hak anak. Maka industri program televisi pun diharapkan memiliki standar perlindungan yang profesional agar anak dalam mengkonsumsi tayangan program televisi tidak berdampak buruk bagi kehidupannya. Dunia pers memang tak sering dijumpai oleh anak, namun bagaimana dengan tayangan film / sinetron yang lebih diminati oleh anak? Tentu dibutuhkan sebuah regulasi yang lebih

tegas lebih dari dunia pers, sehingga peneliti tertarik untuk membandingkan hasil penelitiannya kelak dengan hasil dari jurnal ini.

Kelima, buku yang dibuat oleh J.S. Roucek.¹⁴ Pembahasan dalam buku “*Social Control*” ialah tentang efektivitas dari Pengendalian Sosial atau *Social Control*. Roucek menganggap bahwa dalam menjaga keteraturan warga, dibutuhkan pengendalian sosial atau *Social Control*. Agar dapat terciptanya tatanan sosial yang teratur. Upaya pengendalian sosial tersebut, membutuhkan *power* / kekuatan dari 3 elemen penting dalam mengupayakan efektivitas, yakni melalui Negara, Hukum dan Pemerintah

Negara adalah sebuah asosiasi dari masyarakat yang berorganisasi yang diselenggarakan untuk tujuan politik dan memiliki peran pengendalian sosial. Negara sebagai asosiasi organ khusus fungsional masyarakat yang memiliki kinerja dalam ranah tujuan sosial, dan otoritas dan keagungan negara di tempatkan dalam apa yang akan menjadi atau diharuskan dan tak terbantahkan.

Hukum adalah bentuk aturan sosial yang berasal dari politik, didalamnya berupa aturan-aturan sosial maupun politik, yang berasal dari kisah adat atau masa lalu yang terbangun atas konsep keadilan, dan dirumuskan ke dalam pernyataan tertulis yang menunjuk kedalam perilaku yang diinginkan untuk kesesuaian dalam keseharian.

¹⁴ J.S Roucek, 1956, *Social Control*, Canada : D. Van Nostrand Company, Hlm. 79

Pemerintah memiliki peran sebagai penggerak, baik dalam memproduksi ideologi dalam suatu negara, memproduksi hukum, dan menjalankan peranannya sebagai perwakilan dari masyarakat. Pemerintah akan buruk jika didalamnya berisi individu yang dangkal mengenai pemahaman tentang proses politik dan proses sosial. Pada praktiknya, pemerintah harus memosisikan diri sebagai pengendalian sosial, termasuk dalam mendoktrin kelompok elit dengan tujuan mengefektifkan peran pemerintah sebagai kontrol sosial.

Relevansi buku ini dengan penelitian “Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta sebagai kontrol sosial” ialah sebagai dukungan teori bagi peneliti dalam melihat efektivitas dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta sebagai kontrol sosial dalam mengontrol Stasiun Televisi dalam setiap bentuk penyarannya.

Keenam, buku yang dibuat oleh Amir Effendi Siregar.¹⁵ Pembahasan dalam buku “Mengawal Demokratisasi Media” memiliki pembahasan yang sangat unik, dimana dalam buku tersebut mengulik sejarah terbentuknya atau lahirnya pertelevisian pertama kali di Indonesia, respon petinggi negeri dalam melihat berkembangnya media, regulator media, hingga posisi atau hubungan KPI dengan media saat melihat semakin rimbanya penayangan pertelevisian di Indonesia.

¹⁵ Amir Effendi Siregar, 2014, *Mengawal Demokratisasi Media (Menolak konsentrasi, Membangun keberagaman)*, PT. Kompas Media Nusantara

Awal pembahasan ialah masa kelahiran dan kejayaan tv pertama kali di era kejayaan Soekarno, serkitar awal dekade 50-an, menteri penerangan mendesak presiden Soekarno untuk meluncurkan pertelivisian pertama di Indonesia yaitu TVRI. Namun, sempat mengalami kontroversial dengan menteri-menteri saat itu, karena pembuatan stasiun pertelevisian saat itu dinilai amat mahal dan kekhawatiran lainnya.

Berbagai alasan dan argumen telah di ulas dan ditujukan kepada presiden Soekarno untuk mendesak segera di buatnya stasiun televisi yaitu TVRI. Hingga argumen yang rasional dan membuat presiden Soekarno menyetujui saat itu untuk dibentuknya stasiun televisi ialah saat momen asian games, karena liputan dan penyiaran asian games di stasiun televisi dianggap mampu membangkitkan rasa nasionalisme bagi bangsa indonesia, Namun perjalanan televisi mulai berubah di zaman Soeharto, dimana berbagai media di kerangkeng olehnya, di intervensi dalam berbagai tayangan, sehingga berdampak kualitas siaran yang kurang baik dan menimbulkan kesadaran semu bagi masyarakat. Dan hingga akhir kekuasaannya mulai terjadi pemberontakan dimana-mana hingga beberapa media pun ikut berontak karena terlalu muak dengan sikap kesewenang-wenangan Soeharto.

Selepas dari runtuhnya Soeharto, beberapa saat kemudian lahirlah KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) KPI adalah regulator media penyiaran di bidang isi dan lahir dari lembaga independen, KPI menjadi ujung tombak harapan

masyarakat dalam isi konten penayangan televisi. Sedangkan untuk layanan sensor, sudah ada wewenang dari Lembaga Sensor Film. Antara Komisi Penyairan Indonesia dengan Lembaga Sensor Film diharapkan ada diskusi bersama agar KPI dapat lebih maksimal dalam mengontrol dan menjaga isi media siaran agar tetap sehat dan tepat sasaran buat kehidupan masyarakat dan LSF, KPI dan masyarakat sama-sama bisa mengawal demokrasi media.

Relevansi buku *Mengawal Demokratisasi Media (Menolak konsentrasi, Membangun keberagaman)* dengan penelitian Skripsi Fungsi KPID DKI Jakarta sebagai kontrol sosial sebagai data pendukung, dimana peneliti menggunakan data tentang perbandingan antara Komisi Penyairan Indonesia dengan Lembaga Sensor Film agar arah penulisan lebih jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas terkait wewenang Peran KPID DKI Jakarta dan wewenang Lembaga Sensor Film “LSF”.

Ketujuh, buku yang dibuat oleh Heru Effendy.¹⁶ Merancang acara televisi dan menayangkannya membutuhkan kepekaan sosial yang tinggi. Bila belum ada peraturan yang mewajibkan pembuatan mata acara melakukan analisis dampak lebih lanjut, sudah saatnya peraturan semacam itu ada. KPI yang mempunyai peran sentral dalam wewenang penyiaran harus peka terhadap kebutuhan regulasi diatas. KPI pun sebaiknya bekerja sama dengan LSM yang peduli dengan hak-hak konsumen, hak-hak perempuan, penyelenggara pendidikan,

¹⁶ Heru Effendy, 2014, *Berhenti Jadi Penonton Televisi*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.

perlindungan anak, perlindungan hukum, penyelenggara kesehatan, dan masalah ketimpangan sosial, agar mampu menyusun dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran serta mengawasi pelaksanaan aturan tersebut.

Persoalan lainnya ialah tidak terlindunginya masyarakat dari tayangan yang memuat kekerasan verbal dan visual. Kekerasan verbal yang dimaksud adalah segala macam makian, sumpah-serapah, dan kalimat lain yang tidak ditujukan untuk diucapkan anak dan remaja. Pada sinetron dan telenovela yang bermotif balas dendam dan atau perselingkuhan banyak ditemui kata, frasa, dan kalimat yang tidak sesuai untuk dikonsumsi anak dan remaja. (Hlm 14)

Masalah lebih lanjut adalah bagaimana mungkin KPI tidak bergantung kepada pemerintah, sedangkan segala biaya operasional berasal dari APBN yang dikelola pemerintah. Menurut UU Penyiaran, KPI sangat tergantung oleh pemerintah dari segi dana operasional, mulai dari usulan mata anggaran APBN ke DPR hingga pencairan dana operasional semuanya berada di tangan pemerintah. Namun, Fungsi lahir KPI disini harus tetap sebagai lembaga negara yang mengabdikan pada kepentingan masyarakat, bukan penguasa. Dalam artian KPI dan KPID bisa efektif dan efisien menjalankan tugasnya mengabdikan pada kepentingan masyarakat. (Hlm 25)

Perwakilan persoalan diatas, buku ini mengajak untuk berhenti jadi penonton TV, karena banyak keresahan-keresahan didalamnya yang menjangkau dan menembus ke ruang organisasi, keluarga, bahkan hingga kamar tidur. Dan yang

mengkhawatirkan, sedikitnya unsur pendidikan dan informasi yang mendidik yang seharusnya jadi menu utama siaran televisi. Acara sinetron beum cukup mendidik, perceraian artis, perebutan hak asuh anak, pernikahan artis, perseteruan artis dengan orangtua atau kerabatnya. Berita penangkapan dengan wajah lebam dan berlumuran darah, tidak cukup mendidik. Relevansi buku ini dengan penelitian “Peran KPID DKI Jakarta sebagai kontrol sosial: ialah Peran KPID DKI Jakarta sebagai kontrol sosial tentu harus menajmin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia, dengan bekerja keras menyamakan persepsi tentang informasi seperti apa yang layak ditonton masyarakat indonesia? Dan membatasi jam siaran dan waktu penayangan yang dipertanyakan unsur mendidiknya. Karena saat ini puluhan sinetron, berita kriminal di hampir semua stasiun tv, tayang sepanjang senin-jumat bahkan minggu, maka benak pemirsa hampir bisa dipastikan penuh sesak oleh gosip, kekerasan (fisik maupun verbal), ceceran darah, dan perseteruan.

Kedelapan, buku yang dibuat oleh George Ritzer.¹⁷ Pembahasan dalam buku “Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern” berisi tentang teori fungsionalisme struktural oleh Robert Marton, mendeskripsikan sumbangsih Robert Marton dalam mengembangkan teori fungsionalisme struktural.

¹⁷ George Ritzer, 2012, *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Marton mengkritik Talcott Parson dalam pandangan fungsionalisme struktural, Marton menganggap teori struktural fungsional Talcott Parson hanya melihat sisi fungsi dari sistem sosial, dan melupakan adanya disfungsi dalam sistem sosial tersebut.

Melalui konsep keseimbangan bersih, Robert Marton berusaha menganalisis fungsionalisme struktural bukan dari arah positif “berfungsi” saja, melainkan juga tertuju pada arah negatif “disfungsi” untuk melihat sejauh mana pandangannya melalui perkembangan teori fungsionalisme struktural dalam melihat sistem sosial pada masyarakat, serta menghubungkan antara kebudayaan, sistem sosial dan anomie yang terjadi di dalam masyarakat.

Relevansi buku ini dengan penelitian “Pengawasan KPID DKI Jakarta terhadap tayangan pertelevisian” guna menganalisis penelitian dengan menggunakan fungsionalisme struktural Robert Marton.

Tabel I.II
Perbandingan Penelitian Sejenis

No	Nama Peneliti	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Khairin Nizomi Literasi Media Analisis Isi Terhadap Tayangan Televisi Pesbukers <i>Jurnal ilmu perpustakaan dan informasi</i>	Deskriptif kualitatif dengan mendalami analisis isi	Analisis tayangan pesbukers (Rimbanya tayangan pesbukers)	pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran pada program Pesbukers ANTV, dimana terdeteksinya penayangan adegan yang melecehkan orang atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu, serta melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.	Persamaannya ialah membahas dan menganalisis terkait konten program televisi yang merugikan bagi masyarakat Perbedaannya ialah dalam jurnal ini tidak membahas peran KPID DKI Jakarta
2	Subhan Afifi Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia <i>Jurnal Komunikasi</i>	Deskriptif kualitatif dengan mendalami analisis isi	Lepasnya tayangan tv dari regulasi	tayangan yang bermasalah yang melanggar P3SPS yang telah ditetapkan, akan mendapatkan perhatian khusus dari KPI. Berbagai teguran, klarifikasi atau bahkan penghentian sementara diberikan kepada stasiun televisi yang dinilai melanggar. “himbauan”, “klarifikasi”, “peringatan”, “Teguran”, hingga “pemberhentian sementara” dan “penghentian”	Persamaannya ialah sama-sama membahas konsekuensi program televisi yang rimba dalam industri tayangannya Perbedaannya ialah dalam jurnal ini tidak membahas lebih mendalam tentang peran KPI, hanya sebatas regulasi, namun tidak melihat ke struktur dan keseluruhannya.

No	Nama Peneliti	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
3	<p>Ida Bagus Sudarma</p> <p>sifat control : sifat dan sanksi sebagai sarana kontrol sosial</p> <p><i>jurnal pengendalian sosial</i></p>	Deskriptif kualitatif	Bentuk penyimpangan sosial dan upaya penekanan penyimpangan melalui tindakan preventif dan tindakan represif	<p>Hasil Penelitian dalam jurnal ini ialah dalam pengendalian sosial dibutuhkan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif merupakan pencegahan yang dilaksanakan oleh pihak berwenang, agar kemungkinan terjadinya sebuah penyimpangan dapat dihindari. Sedangkan tindakan represif merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap seorang atau kelompok yang melakukan pelanggaran, sanksi diberikan guna menghilangkan efek jera.</p>	<p>Persamaannya ialah sama-sama membahas kontrol sosial</p> <p>Perbedaannya ialah dalam penelitian ini tidak membahas pengendalian sosial oleh lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta</p>
4	<p>Dali Osepashvili</p> <p>Children's Right and Challanges Of Journalistic Ethic In Georgian Media</p> <p><i>Journal Media Mass And Communication</i></p>	Analisis Konten	Pemberitaan kasus kekerasan terhadap anak (publish nama korban / anak dan tempat tinggal korban / anak)	<p>dunia pers, dibutuhkan etika dalam sebuah pemberitaan, salah satunya pemberitaan dari korban anak dalam tindakan kekerasan, butuh sentuhan khusus dan pemerhati penuh terkait hak-hak anak, karena data yang di publis, mampu berdampak besar bagi psikologi sang anak.</p>	<p>Persamaannya ialah sama-sama membahas kevlugaran kaum kapital program media televisi</p> <p>Perbedaannya, dalam jurnal ini membahas pemberitaan kasus kekerasan terhadap anak (publish nama korban / anak dan tempat tinggal korban / anak) sehingga memicu kerugian besar bagi korban / anak dalam ranah traumatik</p>

No	Nama Peneliti	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
5	J.S Roucek	Deskriptif kualitatif	Teori pengendalian sosial oleh Negara, Hukum dan Pemerintah	Upaya pengendalian sosial, membutuhkan <i>power</i> / kekuatan dari 3 elemen penting dalam mengupayakan efektivitas, yakni melalui Negara, Hukum dan Pemerintah	<p>Persamaan dalam buku ini ialah membahas mengenai pengendalian sosial</p> <p>Perbedaannya tidak membahas KPID DKI Jakarta</p>
6	Amir Effendi Siregar Mengawal Demokratisasi Media : Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman	Deskriptif Kualitatif	Sejarah media dan korelasi antara media dengan KPI	<p>melihat sejarah berdirinya pertelevisian di Indonesia, kontestasi media dan posisi/kedudukan KPI di hadapan media yang semakin banyak mengeluarkan konten yang semakin hari semakin rimba, serta mengawal demokratisasi media.</p> <p>Kedudukan kpi sebagai pencegah media bertindak semena-mena, dengan berbagai dukungan undang-undang penyiaran, KPI siap mengawasi dan bersikap tegas bagi setiap program tayangan yang melanggar. Namun posisi KPI tidak dapat mensensor tayangan, karena sensor tayangan sudah milik wewenang dari LSF (Lembaga Sensor Film)</p>	<p>Persamaannya ialah melihat sejarah program tayangan televisi dan kedudukan KPI di hadapan media yang rimba</p> <p>Perbedaannya ialah dalam buku ini membahas perbedaan antara KPI dengan Lembaga Sensor Film</p>

No	Nama Peneliti	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
7	Heru Efendy Berhenti Jadi Penonton Televisi	Deskriptif Kualitatif	Keburukan pertelevisian	Merancang acara televisi dan menayangkannya membutuhkan kepekaan sosial yang tinggi. Bila belum ada peraturan yang mewajibkan pembuatan mata acara melakukan analisis dampak lebih lanjut, sudah saatnya peraturan semacam itu ada. KPI yang mempunyai peran sentral dalam wewenang penyiaran harus peka terhadap kebutuhan regulasi diatas. Kpi pun sebaiknya bekerja sama dengan LSM yang peduli dengan hak-hak konsumen, hak-hak perempuan, penyelenggara pendidikan, perlindungan anak, perlindungan hukum, penyelenggara kesehatan, dan masalah ketimpangan sosial, agar mampu menyusun dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran serta mengawasi pelaksanaan aturan tersebut.	Persamaannya membahas keburukan televisi dan KPI yang kurang memiliki kewenangan yang kuat Perbedaannya, dalam buku ini tidak membahas relasi antara KPI dengan stasiun televisi.
8	George Ritzer Teori Sosiologi dari klasik sampai perkembangan terakhir postmodern	Deskriptif Kualitatif	Teori fungsionalisme struktural Robert Marton	Buku ini mendeskripsikan pemikiran Robert Marton dalam teori fungsionalism struktural, dengan menggunakan konsep keseimbangan bersih dengan tidak melupakan kehadiran disfungsional, serta menekankan hubungan kebudayaan, sistem sosial dan anomie yang terjadi di dalam masyarakat	Persamaan, membahas fungsionalisme struktural Robert Marton Perbedaannya, buku ini tidak membahas KPID DKI Jakarta

Sumber : Reading Course peneliti, 2019

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Televisi Sebagai Komunikasi Massa

Menurut Bittner, komunikasi massa adalah proses pesan yang di produksi secara massal dan disebarakan kepada massa, dalam proses penyebarannya membutuhkan peran media karena sebagai sarana pembawa pesan ke audiens yang tersebar luas, salah satu media yang dimaksud ialah televisi.¹⁸

Komunikasi Massa memiliki dua pokok pembahasan yaitu : *pertama*, peran media massa terhadap masyarakat luas beserta institusi-institusinya. Pandangan ini merujuk kepada keterkaitan media massa dengan institusi politik, ekonomi, pendidikan dan agama. *Kedua*, komunikasi massa melihat hubungan antara media dengan audiennya, baik secara kelompok maupun individual.¹⁹

Media massa salah satunya televisi memiliki peran penting dalam memberi pesan kepada banyak orang (massa), dengan televisi sebagai media, akan memberikan berbagai jenis pesan dan dapat ditayangkan melalui berbagai macam konten penyiaran.

Pemberian suatu pesan melalui media massa, salah satunya melalui televisi, tentu sangat dianjurkan memiliki sikap tanggung jawab sosial yang tinggi dalam setiap penyiarannya, dengan memperhatikan setiap jenis konten yang akan di

¹⁸ Marisa Puspita Sari, 2013, *Media Massa Kontemporer*, Depok : C.V. Ulinuha Press. Hlm 1

¹⁹ Morissan, M.A. 2008. *Manajemen Media Penyiaran*. Jakarta : Kencana Prenada. Hlm 14

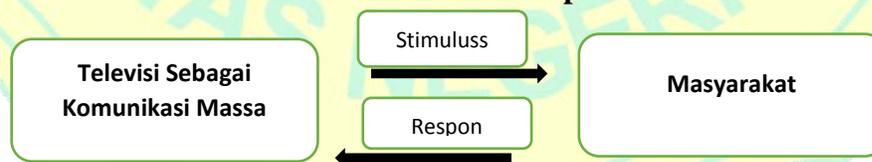
publish kepada masyarakat, terlebih tidak mengedepankan tayangan yang *non-edukatif* namun terus berpijak atas mandat Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran, agar mampu melahirkan berbagai tayangan yang bermanfaat dan mampu memajukan masa depan negara.

Stasiun Televisi harus memiliki sikap tanggung jawab sosial, karena masyarakat *non-literacy* memiliki kemampuan baca rendah, dan dikhawatirkan jika Stasiun Televisi menampilkan tayangan buruk, maka masyarakat *non-literacy* akan menjadikan tayangan televisi sebagai contoh untuk ditiru dalam keseharian masyarakat.²⁰

Televisi akan mempengaruhi kognitif, afektif dan konatif bagi masyarakat, termasuk masyarakat *non-literacy*. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan ditambah pengetahuan. Efek afektif berhubungan dengan emosi, perasaan dan attitude (sikap), adapun efek konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu.²¹

Skema I.I

Stimulus dan Respon



Sumber : Hasil Interpretasi Peneliti, 2020

²⁰ Sunardian Wirodono, 2005. *Matikan TV-Mu!*, Yogyakarta : Resist Book, Hlm. 148

²¹ Amri Jhi, 1998. *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia Ketiga*, Jakarta : Gramedia, Hlm. 115.

Televisi digunakan dalam konsep penelitian fungsi KPID DKI Jakarta untuk melihat dan analisis bagi peneliti dalam dampak dari tayangan pertelevisian, karena televisi akan menampilkan stimulus kepada masyarakat, kemudian masyarakat akan memberi respon terhadap tayangan pertelevisian.

1.6.2 Fungsionalisme Merton terhadap KPID DKI Jakarta dalam mengawasi tayangan pertelevisian

Masyarakat adalah sebuah kesatuan yang didalamnya terdapat bagian dan fungsi yang berbeda, namun bagian dan fungsi tersebut memiliki tujuan untuk terciptanya sebuah sistem yang seimbang bagi masyarakat. Fungsi menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, dengan tertuju pada objek tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga ke depan akan hadir perkataan “berfungsi” atau “tidak berfungsi.

Kesalingbergantungan antara masyarakat dengan lembaga sosial merupakan ciri dari struktural fungsional, sehingga jika salah satu atau beberapa ada yang tidak berfungsi, maka akan merusak keseimbangan sistem. Kesalingbergantungan antara masyarakat dengan lembaga sosial akan tercipta dalam tatanan nilai dan norma, karena nilai dan norma menjadi sebuah dasar dalam lahirnya struktural fungsional dan tercipta berdasarkan konsensus.²²

²² I.B. Wirawan, 2013, *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma*, Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, Hlm. 45

Menurut fungsionalisme Talcott Parson, asumsi dasar teori fungsional struktural terletak dalam memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, bagian-bagian tersebut harus berfungsi atau fungsional, karena bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya.²³ Masyarakat adalah suatu sistem dari bagian yang saling berhubungan dan bekerja secara harmonis untuk menjaga keseimbangan seluruh sistem sosial, seperti masing-masing lembaga utama berkontribusi sebagai fungsi bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.

Robert Merton mengkritik beberapa aspek teori fungsionalisme struktural Talcott Parson, dengan wawasan-wawasan konseptualnya yang baru membantu memberi manfaat yang berkelanjutan bagi fungsionalisme struktural, Merton dianggap telah mendorong fungsionalisme struktural ke arah kiri secara politis dan dipengaruhi oleh pemikiran Marxian dibanding Parson.

Merton mengembangkan fungsionalisme struktural dengan memperhatikan adanya disfungsi, sebagaimana struktur-struktur atau lembaga-lembaga dapat berperan dalam pemeliharaan bagian-bagian sistem sosial “arah positif”, mereka

²³ Bernard Raho, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Prestasi Pustaka. Hlm 48

juga dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi negatif didalamnya “arah negatif”.²⁴

Arah positif dan arah negatif tersebut dikembangkan oleh Merton melalui konsep keseimbangan bersih, karena Merton menganggap fungsionalisme struktural harus diorientasikan melalui cara pandang sang sosiolog, dengan tidak melupakan kehadiran disfungsi dalam struktur-struktur atau lembaga-lembaga.²⁵

Konsep keseimbangan bersih oleh Robert Merton memberikan sumbangsih besar bagi teori fungsionalisme struktural, dengan mengakui adanya disfungsi serta membantu teori fungsional dalam mengatasi hal-hal bias dan membuka jalan bagi perubahan sosial yang bermakna, serta mempunyai manfaat besar bagi sosiolog yang ingin melaksanakan analisis struktural fungsional.

Hubungan kebudayaan, struktur dan anomie menjadi penekanan Merton dalam menganalisis fungsionalisme struktural, Merton mendefinisikan kebudayaan sebagai sekumpulan nilai-nilai normatif terorganisir yang mengatur perilaku yang lazim bagi para anggota suatu masyarakat atau kelompok”, dan struktur sosial sebagai “sekumpulan hubungan-hubungan sosial

²⁴ George Ritzer, 2012, *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm 429

²⁵ Ibid, Hlm. 432

terorganisir yang dengan berbagai cara mengikat para anggota masyarakat atau kelompok”.²⁶

Anomi sebagai “keadaan masyarakat yang ditandai oleh pandangan sinis (negatif) terhadap sistem norma, hilangnya kewibawaan hukum dan disorganisasi hubungan antara manusia”, terjadi apabila ada pemisahan tajam antara norma-norma dan tujuan-tujuan serta kemampuan para anggota kelompok terstruktur secara sosial untuk bertindak selaras dengannya. Anomi dapat terjadi karena posisinya di dalam struktur sosial masyarakat, orang-orang tertentu tidak mampu bertindak selaras dengan nilai-nilai normatif.

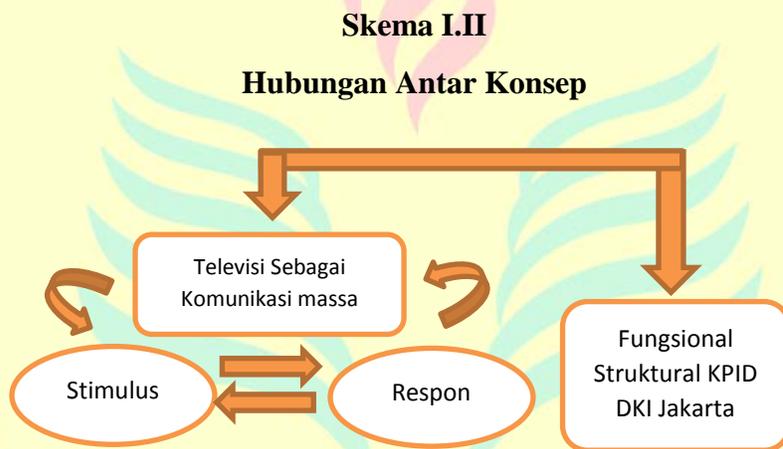
Merton mengaitkan anomie dengan penyimpangan, sehingga Merton berargumen bahwa pemisahan di antara kebudayaan dan struktur mempunyai konsekuensi disfungsional, dan menyebabkan terjadinya penyimpangan di dalam masyarakat, dengan hal itu memperlihatkan bahwa Merton lebih berminat dengan disfungsi-disfungsi dalam melihat paradigma fungsionalnya.

Lembaga yang akan di analisis dalam teori fungsionalisme struktural Robert Marton adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta, dengan melihat konsep keseimbangan bersih untuk melihat pengawasan KPID DKI Jakarta sudah berfungsi atau disfungsi, serta melalui penekanan hubungan kebudayaan, sistem

²⁶ Ibid, Hlm. 436

sosial dan anomi untuk pisau analisis bagi peneliti bila pengawasan KPID DKI Jakarta terlihat disfungsional.

1.6.5 Hubungan Antar Konsep



Sumber : Hasil Interpretasi peneliti, Tahun 2020

Kerangka konseptual yang pertama diangkat dalam penelitian ini adalah Televisi sebagai komunikasi massa, pembahasannya mengenai fungsi komunikasi yang memberikan stimulus kepada masyarakat dan masyarakat memberi respon terhadap tayangan televisi, kemudian akan dianalisis melalui perwakilan dari tayangan televisi. Kedua, peneliti akan analisis KPID DKI Jakarta terkait fungsinya dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural Robert Merton dengan melihat konsep keseimbangan bersih untuk melihat pengawasan KPID DKI Jakarta sudah berfungsi atau disfungsi, serta melalui

penekanan hubungan kebudayaan, sistem sosial dan anomi untuk pisau analisis bagi peneliti bila pengawasan KPID DKI Jakarta terlihat disfungsi.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala *sentral*, untuk memahami gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.²⁷ Menurut Neuman, data yang sudah terkumpul maupun masih dalam tahapan pencarian kualitatif, dapat dikembangkan dengan konsep yang sudah ditentukan.²⁸

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Dimana untuk data primer akan dilakukan melalui beberapa teknik dalam metode kualitatif antara lain wawancara terfokus/mendalam

²⁷ Conny R Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif : jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta : PT Grasindo, 2010, Hlm 07

²⁸ W. Lawrence Neuman, *Metode Penelitian Sosial : Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Jakarta : PT Indeks, 2013, Hlm. 226

terhadap komisioner KPID DKI Jakarta (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta). kemudian data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan, studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh teori, konsep maupun keterangan-keterangan melalui hasil penelitian buku-buku, Journal atau bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, hasil penelitian tersebut kemudian di analisis secara deskriptif.

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta yang berlokasi di Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 7, Jl. Awaludin II No. 01, Tanah Abang, RT 02/RW 07, kb. Melati, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10130. Durasi waktu penelitian dari penyusunan proposal hingga mendapatkan hasil penelitian dimulai pada 12 Agustus 2019 hingga 10 Desember 2019.

1.7.3 Subjek Penelitian

Penulis menfokuskan penulisan ini pada pimpinan KPID DKI Jakarta (Drs. Kawiyan, M. I. Kom.) untuk mengetahui peran KPID DKI Jakarta sebagai kontrol sosial, selain itu peneliti pun mewawancarai beberapa komisioner KPID DKI Jakarta, yakni Koordinator bidang isi siaran (Puji Hartoyo) dan Koordinator Kelembagaan (Muhammad Said, M.Si.), untuk menggali subjek penelitian, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang peneliti anggap

memiliki pemahaman yang baik mengenai topik penelitian yakni Rahmat Edi Irawan selaku Kepala Divisi Pelayanan Produksi NET TV dan juga sebagai Pers Presiden NET TV, Peneliti menjadikan Rahmat Edi Irawan sebagai narasumber guna menggali data masuknya sebuah program ke Stasiun Televisi Net TV dan karakteristik tayangan yang hadir di NET TV. Muhammad Ichwan Yuliawan selaku Koordinator *Headsection Planning Primetime* (RCTI) guna mengetahui proses masuknya program di Stasiun Televisi RCTI, Pratiwi Handarulan selaku Akuisision Lokal Drama (RCTI).pun dijadikan sasaran narasumber oleh peneliti guna mengetahui karakteristik tayangan yang dapat masuk di RCTI. Peneliti juga mewawancarai LSM Remotivi dan tenaga ahli pemantauan isi siaran sebagai triangulasi data.

Tabel I.III
Karakteristik Subjek Penelitian

Posisi Subjek Penelitian	Nama Informan	Usia Informan	Cakupan Isi Data
Pimpinan KPID DKI Jakarta	Drs. Kawiyan, M. I. Kom	8 Februari 1965	Gambaran umum KPID DKI Jakarta; - Struktur dan peran KPID DKI Jakarta - Bentuk kegiatan KPID DKI Jakarta
Koordinator Bidang Kelembagaa	Muhammad Said, M.Si.		Tugas dan fungsi - Deskripsi struktur KPID - selektif anggota masing-masing

n			struktur -masa aktif jabatan -pemberhentian anggota - Bentuk kegiatan KPID untuk mengoptimalkan kontrol sosial dalam tayangan tv swasta
Koordinator Bidang Isi Siaran	Puji Hartoyo	22 Februari 1976	Tugas dan Fungsi - Definisi bidang isi siaran - Selektif anggota dan masa kinerja - Kinerja Divisi Isi Siaran - bentuk sanksi KPID DKI Jakarta
Kepala Divisi Pelayanan Produksi dan juga sebagai Pers Presiden (Net TV)	Rahmat Edi Irawan		- upaya KPI dalam menjalin hubungan dengan stasiun televisi swasta - bentuk sosialisasi dari KPI tentang UU penyiaran - prosedur dari KPI terhadap kontrak perizinan mengudara stasiun televisi
Divisi Akuisisi (RCTI)	Pratiwi Handarulan		Kerjasama antara stasiun tv dengan sutradara dan penulis
Divisi Headsection Planing (RCTI)	Muhammad Ichwan Yuliawan		Konten yang dapat masuk di RCTI

sutradara sebagian tayangan di RCTI	Yogi Yosep		Triangulasi Data - bentuk kerjasama sutradara dengan stasiun tv
Peneliti Media Remotivi	Firman Imaduddin		Peran KPID dalam mengontrol tayangan pertelevisian

Sumber : hasil temuan lapangan, 2019

1.7.4 Peran Peneliti

Peran peneliti disini sebagai orang yang meneliti atau pengamat dari penelitian tersebut. Peneliti berusaha mencari tahu peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta dalam mengontrol tayangan pertelevisian agar tidak keluar dari koridor Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data secara mendalam. Bekal pengetahuan yang dimiliki peneliti cukup membantu dalam melihat fenomena yang ada. Untuk menyempurnakan data penelitian, peneliti disini turut andil dalam rutinitas aktivitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta melalui program magang yang diikuti oleh peneliti di tempat tersebut. Sehingga diharapkan peneliti mampu mengamati pun juga merasakan secara langsung dari rutinitas aktivitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta, dan menganalisis kegiatan mereka untuk kebutuhan data penelitian.

1.7.5 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi atau Pengamatan

Penelitian ini mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lokasi penelitian. Peneliti menggunakan metode observasi atau pengamatan atas fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi dalam pengamatan ini dilakukan secara berkala. Secara umum, observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan data dengan melakukan pengamatan melalui panca indra peneliti. Tujuan dari metode ini ialah agar peneliti dapat mengetahui serta mengupas sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta dalam mengontrol tayangan pertelevisian agar tidak keluar dari koridor Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Observasi pertama yang dilakukan peneliti ialah dengan mencari dan mendatangi kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta, dengan harapan mampu diterima untuk melaksanakan program magang di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta (KPID DKI Jakarta) dan pun sebagai pendukung dalam pengambilan data kebutuhan untuk skripsi. Observasi selanjutnya ialah, disini peneliti akan menggeluti ataupun turut andil di berbagai bidang divisi atau program kerja yang ada di KPID DKI Jakarta agar mengetahui dan merasakan secara langsung bentuk program apa saja yang ada di KPID DKI Jakarta. Selanjutnya peneliti akan menganalisis dari aktivitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu pada informan. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui secara dalam data yang peneliti cari pada narasumber. Peneliti disini menggunakan wawancara secara langsung pada informan-informan terkait. Wawancara langsung dilakukan secara terstruktur dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Walaupun begitu, jika memungkinkan, ada juga beberapa pertanyaan yang terkadang peneliti improvisasi saat wawancara untuk mendapatkan data yang lebih padat dan mendalam.

c. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Dokumentasi merupakan setiap catatan tertulis ataupun tidak tertulis seperti foto dan arsip-arsipnya yang berhubungan dengan suatu peristiwa. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data secara sekunder dengan cara mengamati dan mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan obyek penelitian. Teknik ini digunakan bertujuan, menggambarkan secara jelas bahkan memvisualisasikan mengenai peristiwa-peristiwa yang menunjang penelitian. Foto-foto ini meliputi kegiatan yang dilakukan oleh anggota dari KPID DKI Jakarta dari setiap program kerjanya. Foto-foto tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran secara nyata mengenai fokus penelitian.

1.7.6 Keterbatasan Penelitian

Selama proses penelitian dilakukan, tidak seluruhnya berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan diawal. Peneliti menjumpai beberapa kendala yang menjadi keterbatasan penelitian, seperti peneliti memahami kurangnya ruang diskusi sehingga pemahaman mengenai keresahan media dan peran KPID DKI Jakarta sebagai kontrol sosial belum sempurna. Selain itu hambatan lainnya mengenai keterbatasan waktu yang dialami oleh peneliti, baik saat prosesi perdana magang di Komisi Penyairan Indonesia Daerah DKI Jakarta, hingga dalam menggali data kepada sasaran narasumber, karena narasumber memiliki posisi penting di Komisi Penyairan Indonesia Daerah DKI Jakarta, yakni sebagai Ketua / Pimpinan Komisi Penyairan Indonesia Daerah DKI Jakarta dan berbagai perwakilan koordinator sehingga membutuhkan waktu luang untuk melaksanakan wawancara mendalam. Hambatan lainnya ialah dalam menggali triangulasi data terhadap sutradara dan peneliti media Remotivi, karena butuh perizinan yang cukup sulit dan mengagendakan pertemuan yang sering terbentur karena kesibukan narasumber.

1.7.7 Triangulasi Data

Penelitian ini membutuhkan kevalidan dan keabsahan terhadap data yang telah diperoleh selama proses pengamatan dan wawancara di KPID DKI Jakarta

dan Stasiun Televisi (RCTI dan NET TV). Disini peneliti melakukan wawancara lebih dari 1 informan (informan inti dan informan lain) dengan harapan mampu memastikan kevalidasian data yang diperoleh dari wawancara. Peneliti menjadikan sutradara “Yogi Yose” dan perwakilan LSM Remotivi “Firman Imaddudin” sebagai triangulasi data dalam penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab ; satu bab pendahuluan, dua bab uraian empiris, satu bab analisis dan satu bab kesimpulan.

BAB I ; Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka sejenis, kerangka konseptual / skema berpikir penulis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II ; Membahas Gambaran Umum yang tertuju pada internal lembaga yang tertuju pada Kontrol Sosial, yang diawali dengan dasar pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta, Kelembagaan KPID DKI Jakarta, dalam bab ini peneliti akan menguraikan Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta beserta karakteristik informan

BAB III ; Peneliti akan memfokuskan penelitian pada hasil temuan di lapangan yaitu pengawasan KPID DKI Jakarta terhadap tayangan pertelevisian agar tidak keluar dari koridor Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, dengan melihat

bentuk upaya pengawasan dan sanksi yang diberikan KPID DKI Jakarta terhadap stasiun televisi.

BAB IV ; Pembahasan analisis dari hasil temuan lapangan yakni seberapa besar fungsi pengawasan KPID DKI Jakarta terhadap tayangan pertelevisian dengan mengaitkan permasalahan yang dikaji dengan konsep dan teori yang akan digunakan peneliti, yaitu dengan konsep yang tercantum dalam kerangka konseptual, mengenai konsep televisi sebagai komunikasi massa dan didukung dengan teori fungsionalisme struktural Robert Merton

BAB V ; Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta saran dari peneliti mengenai penelitian yang dikaji.

